



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



2022

LAPORAN HASIL EVALUASI

PEMERINTAH KAB. MURUNG RAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu. Selain itu, pemantauan dan evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 31 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses		Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis	
1. Rintisan	Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .	1. Informasi	Layanan SPBE dalam bentuk satu arah
2. Terkelola	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi	2. Interaksi	Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
3. Terstandardisasi	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi	3. Transaksi	Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
4. Terintegrasi dan Terukur	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif	4. Kolaborasi	Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain
5. Optimum	Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas	5. Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

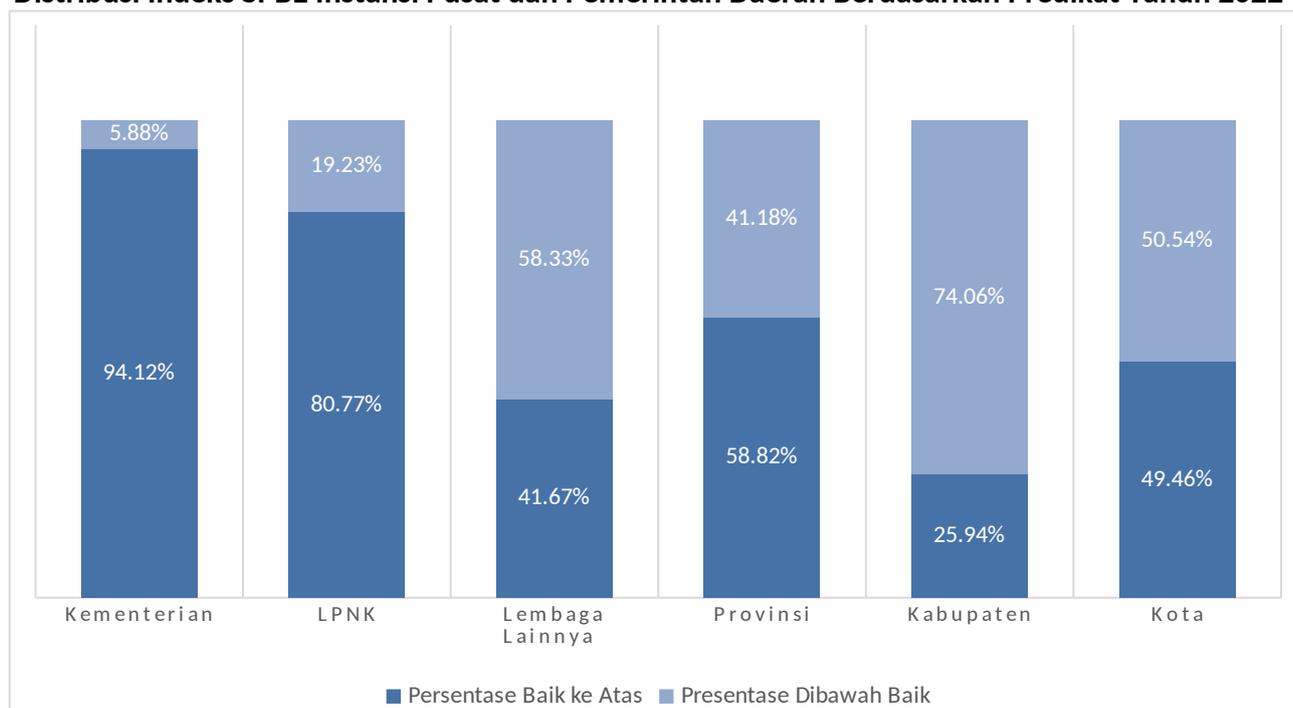
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 - < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 - < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 - < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 - < 3,5	Baik *)	4	1,8 - < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 - 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 - < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 - < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 - < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

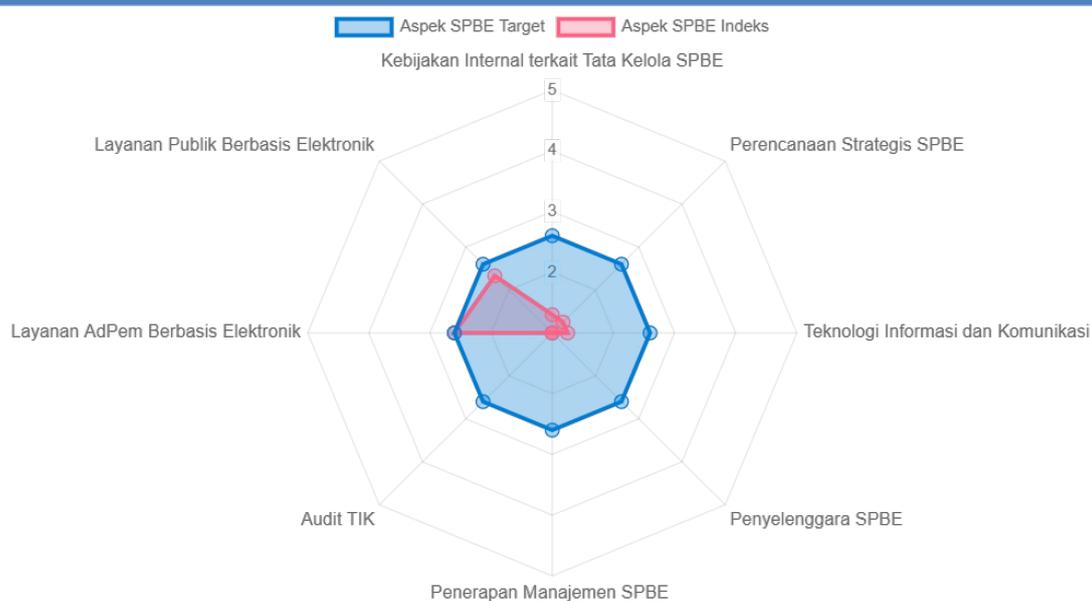
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,35	3,14	2,92	2,33	2,74	2,17	2,50
Domain Kebijakan	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Domain Tata Kelola	1,85	2,86	2,59	1,94	2,27	1,64	1,98
Perencanaan Strategis	1,70	2,63	2,33	1,90	2,00	1,53	1,70
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,92	2,93	2,77	2,04	2,40	1,68	2,11
Penyelenggaraan SPBE	2,02	3,16	2,75	1,83	2,57	1,78	2,28
Domain Manajemen	1,32	2,01	1,64	1,36	1,51	1,21	1,36
Penerapan Manajemen SPBE	1,35	2,14	1,62	1,37	1,55	1,23	1,41
Audit TIK	1,24	1,66	1,69	1,34	1,38	1,15	1,23
Domain Layanan SPBE	2,97	3,72	3,58	2,86	3,45	2,79	3,18
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,03	3,71	3,58	3,07	3,46	2,85	3,23
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,89	3,74	3,58	2,55	3,44	2,71	3,09

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2022



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	1,77
Domain Kebijakan SPBE	1,30
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	1,30
Domain Tata Kelola SPBE	1,20
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	1,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	2,49
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	2,60
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	2,33

Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan pemenuhan aspek pada kebijakan internal terkait tatakelola SPBE di Kab. Murung Raya masih belum dapat terpenuhi (1,30). Pemenuhan aspek hanya dijumpai pada indikator 3 (manajemen data) dengan tingkat nilai kematangan 3.

- **Kekuatan**
Belum ada indikator yang menjadi kekuatan pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE. Hanya pada indikator 3, Kebijakan Internal Manajemen Data di Kabupaten Murung Raya yang telah dapat menggambarkan tingkat kematangan pada level 3 (masih belum bisa disebut sebagai kekuatan). Perbup No 16 tahun 2022 walaupun tujuannya mengatur kebijakan satu data tetapi di dalamnya terdapat berbagai hal yang memuat pengaturan manajemen data.
- **Kelemahan**
Pemerintah Kab. Murung Raya belum memiliki peraturan yang mengatur kebijakan internal terkait tatakelola SPBE, walaupun tersedia dalam bentuk draft peraturan. Hanya pada indikator pembangunan aplikasi SPBE yang tersedia peraturan itupun berupa peraturan lama dalam bentuk Perbup no 31 tahun 2017 tentang road map pengembangan TIK, pada pasal 5 sd 10 telah diatur yang mencakup pengembangan sistem aplikasi TIK (tidak menggunakan term SPBE) yang memenuhi nilai kematangan 2. Disarankan dalam peraturan baru yang disusun kemudian menyertakan pengaturan terkait pembangunan aplikasi SPBE

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan pemenuhan aspek dari sisi perencanaan strategis SPBE di Kabupaten Murung Raya belum dapat terpenuhi (1,25), semua 4 indikator yang ada baik dari sisi arsitektur SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, dan inovasi Proses bisnis SPBE semua berada pada nilai kematangan level 1. Sedangkan pada indikator Peta Rencana SPBE, berada di level 2

- **Kekuatan**
Pada aspek perencanaan strategis tidak dijumpai adanya unsur kekuatan dalam aspek ini, karena Pemerintah Kab. Murung Raya belum memiliki (atau setidaknya tidak ada data dukung yang sesuai yang menunjukkan adanya) dokumen terkait Perencanaan Strategis SPBE
- **Kelemahan**
Pemerintah Kab. Murung Raya belum memiliki peraturan atau dokumen yang mengatur Perencanaan Strategis SPBE (belum tersedia dokumen terkait arsitektur SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, dan inovasi Proses bisnis SPBE). Sedangkan indikator Peta Rencana SPBE juga masih berada di level 2

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan pemenuhan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Murung Raya masih belum dapat terpenuhi (1,25), semua 4 indikator pembangunan aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan penggunaan sistem penghubung layanan tingkat kematangan masih berada di level 1. Sedangkan indikator layanan jaringan intra berada di level 2.

- **Kekuatan**
Pada aspek teknologi Informasi dan komunikasi masih belum didapati adanya unsur kekuatan terkait dengan aspek teknologi informasi dan Komunikasi di Kabupaten Murung Raya.
- **Kelemahan**
Semua indikator ini dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi merupakan titik lemah dalam tatakelola SPBE di Kabupaten Murung Raya, indikator pembangunan aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan penggunaan sistem penghubung layanan tingkat kematangan masih berada di level 1. Sedangkan indikator layanan jaringan intra berada di level 2. Layanan Jaringan Intra telah tersedia namun belum diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di kabupaten ini

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan pemenuhan Aspek Penyelenggara SPBE di Kabupaten Murung Raya belum dapat terpenuhi (1). Semua 2 indikator tim koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE tingkat kematangannya berada di level 1

- **Kekuatan**

Pada aspek penyelenggara SPBE tidak dijumpai adanya unsur kekuatan dalam aspek ini, karena Pemerintah Kab. Murung Raya belum memiliki (atau setidaknya tidak ada data dukung yang sesuai yang menunjukkan adanya) dokumen terkait Penyelenggara SPBE

- Kelemahan

Pemerintah Kab. Murung Raya belum memiliki dokumen terkait penyelenggara SPBE (belum tersedia dokumen terkait tim koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE). Tidak tersedia data dukung dan dokumen yang tersedia masih dalam bentuk draft.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan pemenuhan Aspek Penerapan manajemen SPBE di Kabupaten Murung Raya belum dapat terpenuhi (1), semua 8 indikator pada aspek ini mempunyai nilai tingkat kematangan level 1.

- Kekuatan

Pada aspek penerapan manajemen SPBE tidak dijumpai adanya unsur kekuatan dalam aspek ini, karena Pemerintah Kab. Murung Raya belum memiliki (atau setidaknya tidak ada data dukung yang tersedia/sesuai yang menunjukkan adanya) dokumen terkait Penerapan manajemen SPBE

- Kelemahan

Pemerintah Kab. Murung Raya belum menerapkan manajemen SPBE (belum tersedia data dukung/dokumen terkait yang dapat menunjukkan adanya penerapan manajemen SPBE). Semua 8 indikator penerapan manajemen SPBE berada pada level 1.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan pemenuhan Aspek Audit TIK di Kabupaten Murung Raya belum dapat terpenuhi (1), semua 3 indikator pada aspek ini yaitu pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, pelaksanaan audit aplikasi SPBE, dan pelaksanaan audit Keamanan SPBE mempunyai nilai tingkat kematangan level 1.

- Kekuatan

Pada aspek Audit TIK tidak dijumpai adanya unsur kekuatan dalam aspek ini, karena Pemerintah Kab. Murung Raya belum menerapkan audit TIK, baik audit infrastruktur, audit aplikasi maupun audit keamanan SPBE. Tidak ada data dukung yang sesuai yang menunjukkan adanya pelaksanaan audit SPBE.

- Kelemahan

Pemerintah Kab. Murung Raya masih belum menerapkan audit TIK. Semua indikator yang ada merupakan merupakan kelemahan dari aspek ini

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan pemenuhan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Murung Raya masih belum terpenuhi, walaupun nilainya sudah tergolong baik(2,7). Pemenuhan aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Murung Raya dari 10 indikator memiliki tingkat kematangan berkisar antara 1- 4. Indikator yang tidak memenuhi ada pada indikator layanan akuntabilitas kinerja organisasi dengan tingkat kematangan, layanan kearsipan dinamis dan layanan pengelolaan barang milik daerah (SIMDA BMD) yang masih berada pada level 1. Indikator layanan kepegawaian dengan menggunakan SIMPEG yang masih berada di level 2, dan layanan pengawasan internal pemerintah (e-auditee) sertalayanan akuntabilitas kinerja organisasi (e-sakip) dengan tingkat kematangan 3. Adapun 4 indikator lainnya yaitu layanan perencanaan (SIPD), layanan penganggaran(SIPD), layanan keuangan (SIPD), pengadaan barang dan jasa(SPSE) semuanya berada pada tingkat kematangan level 4.

- Kekuatan

Kekuatan aspek layanan administratif pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Murung Raya pada penggunaan aplikasi umum bagi pakai yaitu pada indikator layanan perencanaan (SIPD), layanan penganggaran(SIPD), layanan keuangan(SIPD), pengadaan barang dan jasa semuanya berada pada tingkat kematangan level 4.

- Kelemahan

Kelemahan pada aspek layanan administratif pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Murung Raya terdapat pada indikator 37 layanan kearsipan dinamis, indikator 41, layanan Kinerja Pegawai dan indikator 38 layanan pengelolaan barang milik negara/daerah yang masih berada pada level 1. Data dukung yang disampaikan tidak dapat digunakan untuk dapat menggambarkan tingkat kematangan layanan kinerja pegawai di Kabupaten Murung Raya. Adapun indikator 36 layanan kepegawaian juga masih berada di level 2

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pemenuhan aspek terkait layanan publik berbasis Elektronik di Kab Murung Raya secara keseluruhan terpenuhi dengan predikat cukup (2,33). Layanan Pengaduan Pelayanan Publik masih belum terpenuhi karena baru ada rencana dari Kabupten ini untuk menggunakan SP4N Lapor. Layanan data terbuka, Layanan Publik sektor 2 berupa Inlislite untuk perpustakaan, dan layanan publik sektor 3 (Sistem informasi pariwisata) ketiganya berada tingkat kematangan level 2. Sedangkan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan menggunakan JDIH berada di level 3, serta layana publik sektor 1 menggunakan sicanik tingkat kematangannya berada di level 4.

- Kekuatan

Kekuatan pada aspek layanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Murung Raya dapat dijumpai pada indikator layanan publik sektor 1 dengan menggunakan sicanik, yang mempunyai tingkat kematangan level 4.

- Kelemahan

Kelemahan pada aspek layanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Murung Raya dapat dijumpai pada indikator Layanan Pengaduan Pelayanan Publik masih belum terpenuhi karena baru ada rencana dari Kabupten ini untuk menggunakan SP4N Lapor sehingga tingkat kematangannya masih berada di level 1. Layanan data terbuka, Layanan Publik sektor 2 berupa Inlislite untuk perpustakaan, dan layanan publik sektor 3 (Sistem informasi pariwisata) ketiganya berada tingkat kematangan level 2.

Rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah memiliki layanan pemerintahan berbasis elektronik yang baik dan layanan publik berbasis elektronik yang cukup. Hanya saja 6 aspek lainnya terkait aspek kebijakan internal tatakelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Penerapan manajemen SPBE dan audit TIK masih kurang dan perlu mendapat perhatian besar. Dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Murung Raya diperoleh predikat yang cukup dalam penerapan SPBE (1,7965) dengan berapapun keunggulan dan kelemahan yang ada.

Adapun yang menjadi keunggulan dalam penerapan SPBE di Kabupaten Murung Raya terletak pada aspek layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik yang dari hasil evaluasi menunjukkan nilai yang baik. Khusus pada Layanan Kinerja Pegawai (indikator 41) dari aspek ini yang perlu mendapat perhatian terkait data dukung yang digunakan atau disarankan juga menggunakan aplikasi umum bagi pegawai seperti SIMPEGNAS yang telah memiliki tingkat kematangan 4. Terbukti bahwa Kabupaten Murung Raya dalam hal ini telah menggunakan berbagai aplikasi layanan bagi pegawai untuk layanan perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang jasa dengan baik dan telah mendapat tingkat level 4 untuk masing-masingnya. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa semestinya hal ini dapat dilakukan untuk layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik lainnya dan juga untuk layanan publik berbasis elektronik. Disarankan bahwa penggunaan common apps (aplikasi umum bagi pegawai) seyogyanya dapat digunakan dengan baik atau dapat ditempuh dengan melakukan replikasi dari layanan publik sejenis yang telah berhasil diimplementasikan dengan baik oleh instansi lainnya.

Adapun yang menjadi kelemahan dari penerapan SPBE di Kabupaten Murung Raya ini terletak pada 6 aspek, 4 aspek di antaranya memiliki nilai yang kurang (1) yaitu penyelenggara SPBE, Penerapan manajemen SPBE, dan Audit TIK. Adapun 2 aspek lainnya yaitu aspek TIK memiliki nilai yang kurang yaitu aspek perencanaan strategis (1,25), aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (1,25) dan aspek kebijakan internal tata kelola SPBE (1,30).

Apresiasi perlu diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang telah menggunakan berbagai aplikasi layanan baik untuk layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dengan baik (2,70) dan berbagai layanan publik berbasis elektronik dengan nilai cukup (2,33). Berbagai indikator layanan no 32, 33, 34 35. dan 45 telah memperoleh tingkat kematangan level 4. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa semestinya hal ini dapat dilakukan untuk layanan baik layanan pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik lainnya. Apabila penerapan aplikasi umum bagi pegawai telah diterapkan dengan baik, hal ini akan dapat mendorong budaya penggunaan dan pemanfaatan aplikasi layanan lainnya. Tentu saja agar penerapan SPBE ini dapat berjalan dengan baik diperlukan perhatian yang besar dan upaya yang sungguh-sungguh memperbaiki aspek-aspek lainnya yang masih lemah. Keberadaan peraturan yang mengatur kebijakan internal tatakelola SPBE perlu segera direalisasikan dengan mengacu pada peraturan tata kelola SPBE nasional yang ada. Demikian juga semua dokumen terkait perencanaan strategis SPBE yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan SPBE Nasional. Selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan setelah itu secara khusus memperhatikan hal terkait penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah harus segera terbentuk dan Kolaborasi antar unit perangkat daerah di Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE seyogyanya dapat dilaksanakan) Untuk itu SK terkait Tim Koordinasi SPBE dapat ditetapkan. Hal ini harus menjadi perhatian dari tahun ke tahun penyelenggaraan SPBE. Disarankan untuk melakukan berbagai inisiatif yang memungkinkan penerapan manajemen SPBE dan pelaksanaan audit TIK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini dapat dilakukan bila berbagai aspek 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dilakukan upaya perbaikan. Pencermatan terhadap kriteria pemenuhan capaian indikator SPBE, misalnya sebagaimana diatur dalam PermenPANRB No. 59 Tahun 2020, perlu dilakukan dengan seksama, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE berikutnya berbagai kriteria pemenuhan indikator dapat dijadikan sebagai acuan program pengembangan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Murung Raya.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	1
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	1
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	1
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	1
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	2